



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# ARAH KEBIJAKAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

(Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 Pengganti Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020)



**#** bangga  
melayani  
bangsa



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# MILESTONE EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

PermenPANRB  
Nomor 14  
Tahun 2014

2014-2019

**Membangun Komitmen**

- Fokus pelaksanaan RB adalah membangun komitmen kepatuhan IP
- Fokus penilaian lebih menitikberatkan pada kepatuhan (pemenuhan dan administrasi)

PermenPANRB  
Nomor 26  
Tahun 2020

2020-2024

**Mendorong Percepatan  
Perubahan**

Pelaksanaan RB tidak hanya membangun komitmen, namun juga melihat perubahan yang dihasilkan pada tata Kelola pemerintahan

PermenPANRB  
Nomor 9  
Tahun 2023

Mulai 2023

**Mewujudkan Birokrasi  
Berdampak**

Pelaksanaan RB diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi nyata khususnya pada capaian pembangunan nasional



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# LATAR BELAKANG



## Evaluasi RB Berdampak

Salah satu upaya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah dengan penajaman pelaksanaan evaluasi yang lebih melihat hasil dan dampak dibandingkan dengan proses. Penajaman evaluasi reformasi birokrasi diharapkan agar terjadi keselarasan antara pelaksanaan reformasi birokrasi dengan tujuan dan hasil pembangunan



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# PENAJAMAN DAN PENYEDERHANAAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI



Lebih mengukur hasil  
dan dampak  
dibandingkan dengan  
proses



Menghilangkan kesan  
penilaian yang bersifat  
administratif



Harmonisasi, integrasi  
dan sinergitas indikator  
penilaian reformasi  
birokrasi



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# TUJUAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi di lingkungan internal kementerian/lembaga/ pemerintah daerah serta dampaknya terhadap permasalahan strategis di masyarakat dan prioritas aktual Presiden

Memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga/ pemerintah daerah periode sebelumnya

Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga/ pemerintah daerah

Menyusun profil nasional pelaksanaan Reformasi Birokrasi



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# PRINSIP PELAKSANAAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

## DINAMIS

Evaluasi Reformasi Birokrasi memungkinkan perubahan pada indikator yang digunakan jika terjadi kondisi mendesak yang menyebabkan perubahan

## HOLISTIK

Evaluasi Reformasi Birokrasi perlu memotret berbagai aspek tata kelola pemerintahan yang dianggap terkait dengan pencapaian sasaran dan tujuan Reformasi Birokrasi

## ORIENTASI HASIL

Evaluasi Reformasi Birokrasi berfokus untuk mengukur hasil atau dampak dari upaya yang telah dilakukan

## KOLABORATIF

Evaluasi Reformasi Birokrasi dilakukan oleh berbagai pihak, lintas sektor atau kementerian/lembaga dengan menekankan kesamaan tujuan

## SINERGIS

Penggunaan indikator dalam evaluasi Reformasi Birokrasi yang selaras atau harmonis satu sama lain

# JENIS DAN PELAKSANA

## Jenis Evaluasi

Evaluasi Internal

Evaluasi Eksternal

## Pelaksana Evaluasi

**Evaluator  
Internal**

APIP masing-masing K/L/D atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan Evaluasi Internal reformasi birokrasi di instansinya

### **Evaluator Meso**

K/L yang memiliki peran, tugas, dan fungsi untuk melakukan evaluasi aspek implementasi kebijakan yang merupakan komponen dari indeks reformasi birokrasi dan menjadi tanggung jawabnya

**Evaluator  
Eksternal**

### **Evaluator Nasional**

Tim evaluator yang ditetapkan oleh Ketua UPRBN yang berperan sebagai koordinator dalam pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tematik dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi K/L/D

# PELAKSANA (Evaluator Eksternal)



Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi akan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip sinergitas, integrasi dan penyederhanaan

**MELALUI KOLABORASI DENGAN INSTANSI MESO**



# Tugas Evaluator Internal

- Melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- Memastikan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- Memberikan saran, rekomendasi, dan perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian/ lembaga/pemerintah daerah;
- Monitoring catatan dan rekomendasi hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi mandatori tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti, serta melaporkannya kepada Evaluator Nasional

# Tugas Evaluator Meso & Nasional

- Evaluator Meso bertugas melakukan evaluasi aspek implementasi kebijakan yang merupakan komponen dari indeks reformasi birokrasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- Evaluator Nasional bertugas mengoordinasikan pengumpulan hasil evaluasi yang dilaksanakan Evaluator Internal dan Evaluator Meso serta melakukan evaluasi atas hasil dan strategi pembangunan reformasi birokrasi.

# GAMBARAN UMUM PROSES EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

## EVALUASI INTERNAL

### PROSES PEMBANGUNAN RB PADA INSTANSI PEMERINTAH

#### PERENCANAAN RB

Penyusunan  
*Road Map* RB



Penyusunan  
Rencana Aksi RB

Evaluasi Perencanaan  
(*Ex-Ante*)

01

#### PELAKSANAAN RB

Pelaksanaan  
Rencana Aksi RB

Evaluasi Pelaksanaan  
(*On-Going*)

02

## EVALUASI EKSTERNAL

Evaluasi Pasca  
Pelaksanaan  
(*Ex-Post*)

03

Penyampaian  
Laporan Hasil  
Evaluasi  
Eksternal

Saran dan rekomendasi untuk menyempurnakan rencana aksi

Tujuan Evaluasi dilakukan untuk memastikan *road map* dan Rencana Aksi RB memiliki kualitas yang baik dan layak menjadi pedoman dalam pelaksanaan RB serta berisi solusi atau pemecahan masalah tata kelola yang terkait dengan isu dan permasalahan K/L/D

Tujuan Evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam *road map* dan rencana aksi berjalan sesuai dengan rencana serta memberikan saran dan rekomendasi dalam menghadapi kendala yang dihadapi

Tujuan Evaluasi dilakukan untuk melihat hasil/dampak pelaksanaan RB, memberi saran dan rekomendasi, serta menyusun profil perkembangan pelaksanaan RB di Indonesia

Evaluatur Internal

Evaluatur Eksternal

# KOMPONEN PENILAIAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

## Dimensi RB General

### Capaian Strategi Pelaksanaan RB General

1. sub komponen kualitas rencana aksi, serta ( 3 )
2. sub komponen implementasi rencana aksi ( 7 )

### Capaian Implementasi Kebijakan Percepatan RB

1. 16 Indikator\* pada Sasaran Strategis 1 "Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif" (33)
2. 2 Indikator\* pada Sasaran Strategis 2 "Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional" (7)

17 Kebijakan Percepatan RB

### Capaian Sasaran Strategis RB

Sasaran Strategis 1 "Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif" (28)

1. Indeks SPBE (9);
2. Capaian Akuntabilitas Kinerja (10);
3. Capaian Akuntabilitas Keuangan (9)

Sasaran Strategis 2 "Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional" (22)

1. SPI (10);
2. SKM (8);
3. Indeks BerAKHLAK (4);
4. *Employer Branding\*\**

## Dimensi RB Tematik

Kementerian/Lembaga

### Capaian Rencana Aksi RB Tematik

### Capaian Indikator Hasil RB Tematik

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan
2. Peningkatan Realisasi Investasi
3. Tingkat Inflasi
4. Tingkat Penggunaan PDN
5. *Menyesuaikan dengan fokus RB Tematik Digitalisasi Pemerrintahan setiap tahunnya*

### Strategi Pelaksanaan RB Tematik

### Capaian Indikator Dampak RB Tematik

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan
2. Peningkatan Realisasi Investasi
3. Tingkat Inflasi
4. Tingkat Penggunaan PDN
5. *Menyesuaikan dengan fokus RB Tematik Digitalisasi Pemerrintahan setiap tahunnya*

*Teknis diatur secara detail dalam Keputusan Menteri*

\*) Terdapat penyesuaian nomenklatur indikator pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023

\*\*\*) Tidak dilakukan penilaian di tingkat mikro

# INDIKATOR PENILAIAN RB GENERAL\*

**Sasaran Strategis 1.**  
Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif

## Indikator Capaian Sasaran Strategis RB

1. Indeks SPBE
2. Capaian Akuntabilitas Kinerja
3. Capaian Akuntabilitas Keuangan

## Indikator Capaian Implementasi Kebijakan Percepatan RB

- |  |  |
|--|--|
| 1. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi               | 10. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran                                     |
| 2. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi | 11. Indeks Pengelolaan Aset  |
| 3. Transformasi Layanan Digital                                | 12. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan |
| 4. Tingkat Maturitas SPIP                                      | 13. Indeks Kualitas Kebijakan  |
| 5. Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI                         | 14. Indeks Reformasi Hukum   |
| 6. Nilai SAKIP   | 15. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor                        |
| 7. Indeks Perencanaan Pembangunan                              | 16. Indeks Tata Kelola Pengadaan   |
| 8. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE              |  |
| 9. Tingkat Digitalisasi Arsip                                  |  |

**Sasaran Strategis 2.**  
Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional

## Indikator Capaian Sasaran Strategis RB

1. Survei Penilaian Integritas (SPI)
2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
3. Indeks BerAKHLAK
4. *Employer Branding*

## Indikator Capaian Implementasi Kebijakan Percepatan RB

1. Indeks Sistem Merit (Integrasi dengan Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional, Tingkat Implementasi Manajemen Talenta ASN, Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN, Indeks Profesionalitas ASN, dan Indeks NSPK)
2. Indeks Pelayanan Publik (Integrasi IPP dengan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI)

*\*) diatur secara detail dalam Keputusan Menteri*

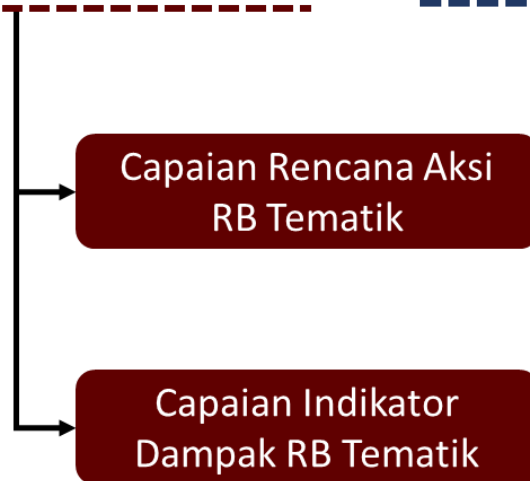


**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# INDIKATOR PENILAIAN RB TEMATIK\*

## Evaluasi RB Tematik Kementerian/Lembaga



## Evaluasi RB Tematik Pemerintah Daerah



\*) *diatur secara detail dalam Keputusan Menteri*

# Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi

Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi		
Kategori	Nilai	Predikat
AA	>100	Sangat Memuaskan
A	>80-100	Memuaskan
A-		Memuaskan dengan Catatan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

## Evaluator Internal

- Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI) dilaporkan kepada tim/unit pelaksana RB internal dengan tembusan kepada evaluator nasional melalui sistem informasi evaluasi RB Nasional.
- Hasil evaluasi *ex-ante* disampaikan paling lambat pada **akhir triwulan pertama** (minggu akhir bulan Maret),
- Hasil evaluasi on-going disampaikan paling lambat pada **minggu pertama triwulan berikutnya**.
- Memuat catatan hasil evaluasi, serta rekomendasi konkret untuk perbaikannya

## Evaluator Meso

- Evaluator meso melaporkan hasil penilaian yang merupakan komponen dari indeks RB dan menjadi tanggung jawabnya.
- Hasil penilaian evaluator meso disampaikan kepada evaluator nasional paling lambat **15 November setiap tahun** melalui sistem informasi evaluasi RB Nasional.

## Evaluator Nasional

- Evaluator nasional melaporkan hasil evaluasi akhir pelaksanaan RB kepada K/L/D y paling lambat **minggu keempat bulan Desember**.
- Memuat besaran indeks RB K/L/D serta rekomendasi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan RB K/L/D



# Koefisien

01

Terdapat kejadian Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan Pimpinan/Pejabat dan/atau Pegawai K/L/D

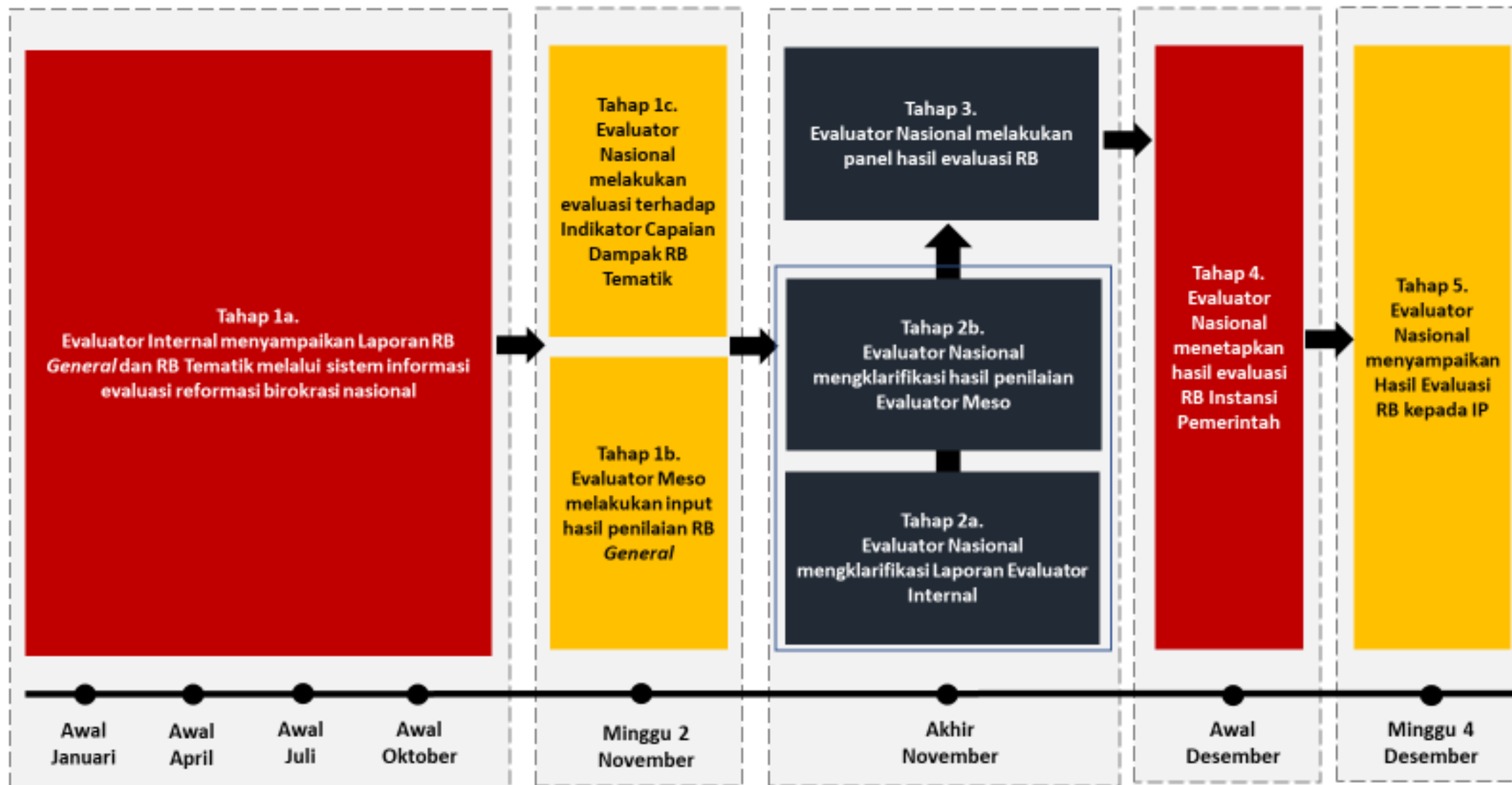
02

Terdapat kasus atau pemberitaan negatif yang viral di media sosial atau media massa yang berkaitan dengan kinerja pelayanan

03

Kondisi lain yang dianggap signifikan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi

# Timeline Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi





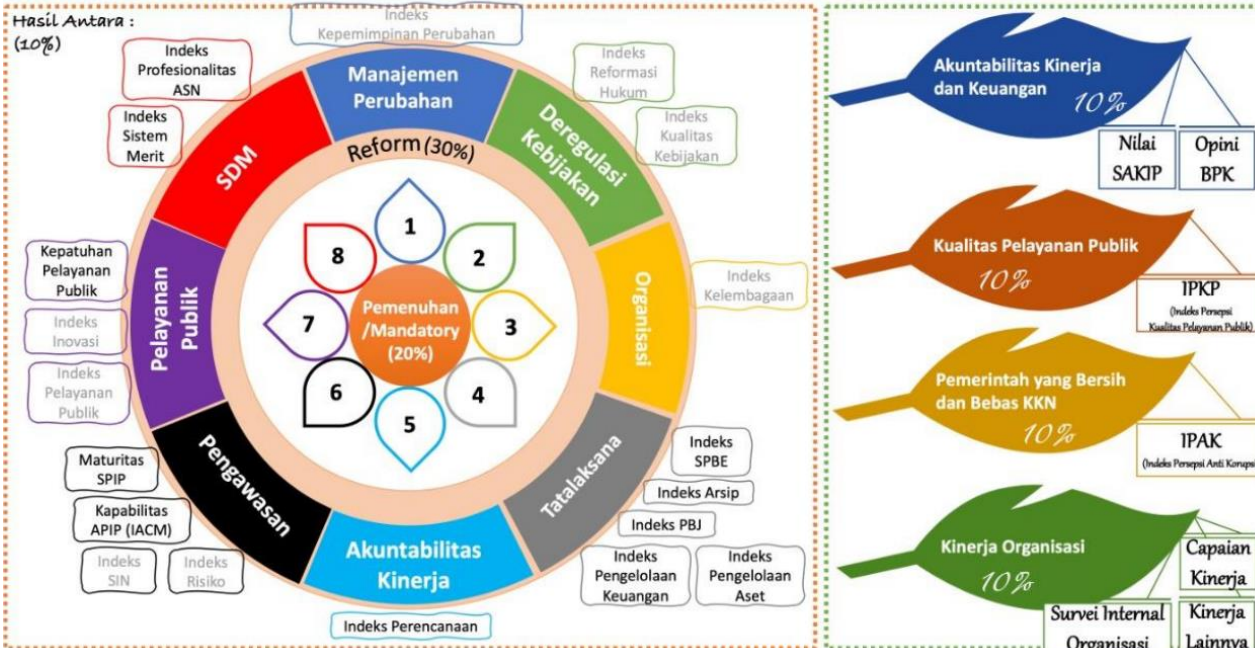
# panrb

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

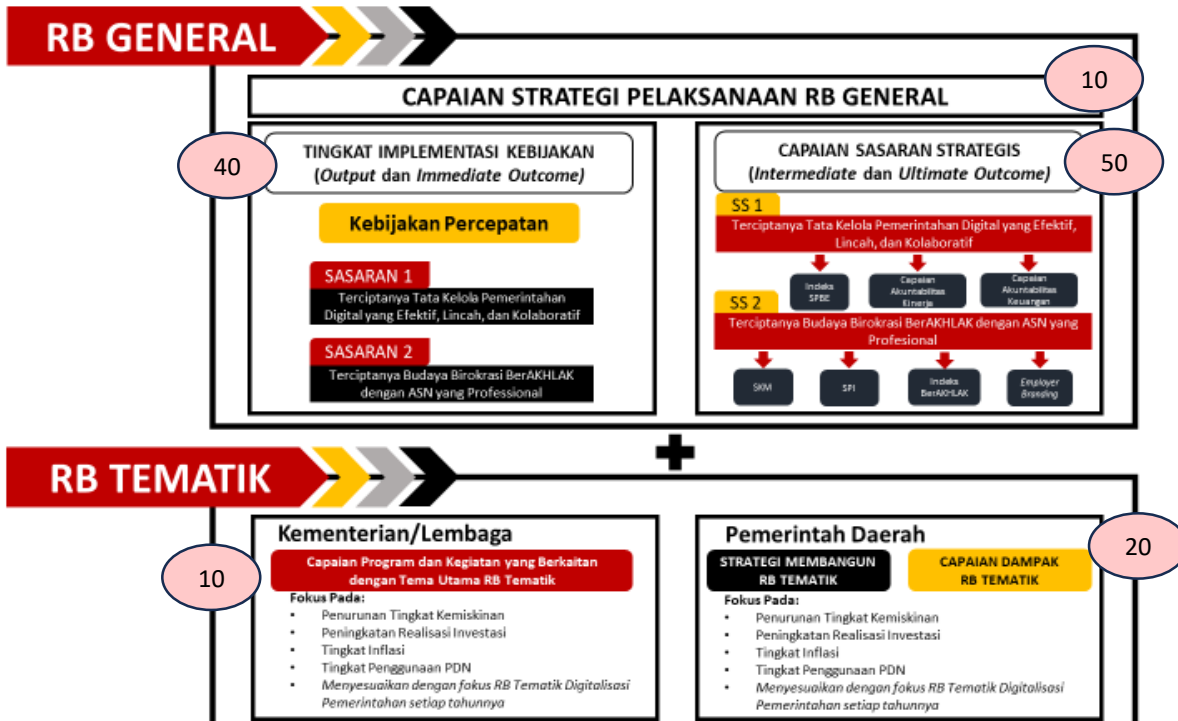
# Perbedaan yang lama dan yang baru

## KERANGKA EVALUASI PERMENPAN 26 TAHUN

2020 **PENGUNGKIT (60%)** **HASIL (40%)**



## KERANGKA EVALUASI REFORMASI BIROKRASI BERDAMPAK



**KOMPONEN PERTANYAAN**

**157** PEMENUHAN

**102** REFORM

**INDIKATOR PENILAIAN**

**4** STRATEGI

**25** HASIL



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

**#** bangga  
melayani  
bangsa

**TERIMA KASIH**

